

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

###### a. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) biasa digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Menurut Amartya Sen, “kelaparan terjadi bukan karena kekurangan bahan pangan namun karena tidak meratanya pembangunan pemerataan distribusi makanan”.<sup>12</sup> Hal ini dikarenakan adanya sistem yang sosial yang tidak adil. Penyebab kelaparan lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial seperti menurunnya upah pekerja, pengangguran, naiknya harga bahan pangan dan lemahnya mekanisme distribusi.

*United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai “*a process of enlarging people’s choice*” yang berarti suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia.<sup>13</sup> Pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fokus dari pembangunan suatu negara ialah manusia, karena manusia merupakan aset negara yang sangat berharga. Definisi

---

<sup>12</sup>Windhu Putra, *Perekonomian Indonesai Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, (Depok: PT Rahagrafindo Persada, 2019), hlm. 241.

<sup>13</sup> Laila Ramadhani Putri. *Op Cit*, hlm. 30.

pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonominya.

Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa” yang secara tidak langsung juga mengandung makna pemberdayaan manusia.

Schult dan Jhingan mengemukakan bahwa ada lima cara dalam pengembangan sumber daya manusia yakni:<sup>14</sup>

- 1) Fasilitas dan pelayanan kesehatan, mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga serta vitalitas rakyat.
- 2) Latihan jabatan, termasuk magang model lama yang diorganisasikan oleh suatu perusahaan.
- 3) Pendidikan yang diorganisasikan secara formal.
- 4) Program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan (khususnya pada pertanian).
- 5) Migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah.

Sebagaimana laporan *United Nations Development Programme* (UNDP) dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Pembangunan harus lebih mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 35.

- 2) Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka saja. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk yang secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonominya semata.
- 3) Pembangunan manusia bukan hanya memperhatikan pada upaya meningkatkan kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga harus melihat pada upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia itu sendiri secara optimal.
- 4) Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.

Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan itu sendiri dan dalam menganalisis pilihan untuk mencapai tujuan dana alokasi umum pembangunan.

b. Komponen yang Mempengaruhi IPM

IPM atau *Human Development Indeks* sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui tiga komponen dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan yang layak, dan standar hidup layak. Komponen umur panjang dan sehat dipresentasikan oleh indikator angka harapan hidup, komponen pengetahuan dipresentasikan oleh indikator angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah, sementara kstandar hidup yang layak dipresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli.<sup>15</sup>

Harapan hidup merupakan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah. Melek huruf didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi mengerti,

---

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik, *Op. Cit.*

menerjemahkan, membuat, mengomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada tulisan. Sedangkan pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Sementara standar hidup layak menunjuk pada kualitas dan kuantitas barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia bagi seseorang yang biasanya diukur oleh pendapatan nyata per orang.

#### c. Manfaat IPM

Adapun manfaat indeks pembangunan manusia antara lain adalah:<sup>16</sup>

- 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
- 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- 3) Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentu Dana Alokasi Umum (DAU).

#### d. Rumus Perhitungan IPM

IPM memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya, yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran. Pengetahuan yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Dan standar hidup layak yang dihitung dari PDB/PDRB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung IPM adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X1 + \text{Indeks } X2 + \text{Indeks } X3)$$

Keterangan :

X1 = indeks harapan hidup

X2 = tingkat pendidikan

X3 = standar hidup layak yang menggunakan indikator kemampuan daya beli.

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

1) Dimensi kesehatan

$$I = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

Keterangan:

I = Indeks angka harapan hidup

AHH = Angka harapan hidup

AHH<sub>min</sub> = Angka harapan hidup terendah

AHH<sub>max</sub> = Angka harapan hidup tertinggi

2) Dimensi pendidikan

$$I = \frac{IHLS + IHRS}{2}$$

I = Indeks komponen

HLS = Harapan lama sekolah

RLS = Rata-rata lama sekolah

3) Dimensi pengeluaran (ekonomi)

$$I = \frac{P - P_{min}}{P_{max} - P_{min}}$$

- I = Indeks pengeluaran  
 P = Angka pengeluaran  
 $P_{\min}$  = Angka pengeluaran terendah  
 $P_{\max}$  = Angka pengeluaran tertinggi

Untuk menghitung IPM, masing-masing komponen digunakan batas maksimum dan minimum seperti yang terlihat dalam tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Batas Maksimum dan Minimum**

| No. | Komponen IPM                         | Batas Maksimum | Batas Minimum |
|-----|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.  | Angka harapan hidup (tahun)          | 85             | 25            |
| 2.  | Angka melek huruf (persen)           | 100            | 0             |
| 3.  | Angka rata-rata lama sekolah (tahun) | 15             | 0             |
| 4.  | Daya beli (Rupiah PPP)               | 792.720        | 360.000       |

Sumber: UNDP, HDI 1994 (Badan Pusat Statistik Lhokseumawe)

e. Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Syariah

*United Nations Development Programme* (UNDP) telah menentukan tiga faktor yang dijadikan tolak ukur akan keberhasilan suatu pembangunan, yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dalam Islam ketiga unsur ini menjadi sebagai faktor penting dalam pembangunan manusia itu sendiri. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW. bersabda: “Barang siapa diantara kamu bangun di pagi hari dengan perasaan aman, sehat tubuhnya dan cukup persediaan makanan pokoknya untuk hari itu, seakan-akan ia telah diberi semua kenikmatan dunia” (HR. Tirmidzi).

Namun bagi Islam, faktor manusialah yang lebih berperan penting dalam sebuah pembangunan yakni manusia yang berperilaku dengan akhlak Islam, manusia yang bebas dan merdeka,

manusia dengan tauhid bersih. Dan tentu saja semua hal ini dapat dicapai melalui *tarbiyah insaniyah* itu sendiri dengan pendidikan yang menyeluruh (*at-tanmiyah asysyumuliyah*) dan bukan sebagaian saja.

Seperti dalam hal kesehatan Rasulullah SAW. juga menjelaskan dalam hadist, Beliau bersabda: “bersiwaklah, karena itu dapat membersihkan mulut dan mendapat keredhaan Allah” (HR. Bukhari dan Muslim). Serta dalam hal ekonomi, Rasulullah SAW memohon perlindungan dengan mengatakan, “Wahai Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran” (HR. Abu Dawud).

## **2. Pengeluaran Pemerintah**

### **a. Teori Pengeluaran Pemerintah**

Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu teori makro dan teori mikro.

#### **1) Teori Makro**

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga poin utama yang dapat digolongkan sebagai berikut: Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai yang mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi

tingkat permintaan secara tidak langsung. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.<sup>17</sup>

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

Adolf Wagner menyatakan bahwa “pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat”. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa “pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar

---

<sup>17</sup>Ferry Prasetya, “Teori Pengeluaran Pengeluaran Pemerintah”, (Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Brawijaya), hlm. 25.

<sup>18</sup>*Ibid.*



penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut”.<sup>19</sup> Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

## 2) Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain

Menurut pandangan Keynes pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah:<sup>20</sup>

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Yang lebih dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y merupakan pendapatan nasional yang mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel lainnya mencerminkan permintaan agregat. Dengan melihat nilai G terhadap Y dapat

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 120.

diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pendapatan nasional.

Teori pembangunan dan pengeluaran pemerintah juga dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, menengah dan lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Sedangkan tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat.<sup>21</sup>

#### b. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen dalam struktur *Produk Nasional Bruto* (PNB). Dalam sebuah pemerintahan, pemerintah akan melakukan pengeluaran atau pembelian agar operasional dan roda perekonomian tetap berjalan.<sup>22</sup> Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 123.

<sup>22</sup> Erni Umi Hasanah dan Danang Sunyoto, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: CAPS, 2018), hlm. 35.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).<sup>23</sup>

Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari perkembangan kegiatan pemerintah setiap tahunnya, terlihat bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir di segala bidang ekonomi.

Menurut Baswir, secara umum anggaran pemerintah dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode dimasa yang akan datang.<sup>24</sup> Berdasarkan struktur anggaran yang dipakai sekarang, maka anggaran pemerintah daerah dinamakan anggaran terpilih. Struktur anggaran pemerintah, dalam sistem anggaran di Indonesia dikenal dua macam pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk operasionalisasi pemerintah seperti halnya untuk pembayaran gaji pegawai dan lainnya. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang dikategorikan sebagai pengeluaran untuk investasi pemerintah, diantaranya investasi disektor publik.

Belanja yang dilakukan pemerintah untuk pendidikan diatur dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN. Pemerintah sangat berperan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam UU

---

<sup>23</sup>Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 215.

<sup>24</sup>Budi D. Sinulingga, "Analisis Pengaruh Distribusi APBD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, (2013), hlm. 106.

Nomor 20 Tahun 2003 yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Alokasi dana kesehatan juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 171 ayat 1 dan 2 tentang Kesehatan, dimana besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di luar gaji dan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji.<sup>25</sup>

Pendidikan merupakan hal penting dalam meningkatkan kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Serta kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, dan keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik.<sup>26</sup>

Pendapatan yang tinggi tidak selalu menjamin tingginya tingkat kesehatan dan pendidikan. Kesehatan dan pendidikan berkaitan sangat erat dengan pembangunan ekonomi. Modal kesehatan yang baik dapat meningkatkan pengembalian investasi yang diberikan untuk pendidikan, karena kesehatan merupakan faktor penting agar seseorang bisa hadir di sekolah. Harapan hidup yang lebih panjang dapat mengembalikan pengembalian atas investasi dalam pendidikan, sementara kesehatan yang baik akan menyebabkan rendahnya tingkat depresi modal pendidikan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Michael P.Todaro dan Stephen C.Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 434.

Sedangkan, modal pendidikan yang baik dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam kesehatan karena banyak program kesehatan bergantung pada berbagai keterampilan yang dipelajari di sekolah khususnya kesehatan.

Dengan pendapatan yang tinggi, masyarakat dan pemerintah mampu mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk pendidikan dan kesehatan. Dengan pendidikan dan kesehatan, produktivitas dan pendapatan yang tinggi akan dengan mudah dicapai. Maka kebijakan pembangunan harus lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan, kesehatan dan pendidikan secara bersama-sama.

#### c. Macam-Macam Pengeluaran Pemerintah

Menurut UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013, pengeluaran negara dibedakan menjadi tiga, yaitu menurut organisasi, sifat dan menurut fungsi. Menurut organisasi, pengeluaran negara digolongkan menjadi tiga yakni:<sup>27</sup>

##### 1) Pengeluaran Pemerintah Pusat

Dalam pemerintah pusat, terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu dana yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pengeluaran pemerintah pusat dibedakan menjadi 2 yang meliputi pengeluaran untuk belanja dan pengeluaran untuk pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja antara lain digunakan untuk belanja pemerintah pusat seperti, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dll. Juga untuk

---

<sup>27</sup> Ferry Prasetya, *Op Cit.*

dialokasikan ke daerah melalui transfer daerah. Sedangkan pengeluaran untuk pembiayaan meliputi pengeluaran untuk obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan lain sebagainya.

## 2) Pengeluaran Pemerintah Provinsi

Jika pada pemerintah pusat terdapat APBN, maka di pemerintah provinsi terdapat APBD yang merupakan hasil dari dana alokasi APBN dan hasil dari pungutan pajak dari masyarakat. Dana APBN digunakan untuk pengeluaran untuk belanja meliputi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja operasi lainnya. Sedangkan belanja modal seperti belanja aset tetap, belanja aset lain-lain, dan belanja tak terduga.

## 3) Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota

APBD dalam kabupaten/kota digunakan antara lain untuk pengeluaran belanja, bagi hasil pendapatan ke Desa/Kelurahan, Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan, terdiri dari bagi hasil pajak ke desa/kelurahan, bagi hasil dan bagi hasil pendapatan lainnya ke desa/kelurahan, pengeluaran untuk pembiayaan, terdiri dari pembayaran pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom lainnya.

Sedangkan menurut sifatnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi lima, antara lain:<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 30.

#### 1) Pengeluaran Investasi

Merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang. Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dan lain sebagainya.

#### 2) Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja

Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

#### 3) Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat

Merupakan pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang membuat masyarakat menjadi bergembira. Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dll.

#### 4) Pengeluaran Penghematan Masa Depan

Merupakan pendapatan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang. Seperti pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim, dan lain sebagainya.

#### 5) Pengeluaran Yang Tidak Produktif

Merupakan pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk biaya perang.

Pengklasifikasian berdasarkan fungsi dibagi menjadi 11 fungsi yang menyangkut beberapa aspek dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang diantaranya

adalah fungsi ekonomi, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, pertahanan, ketertiban dan keamanan, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, pariwisata dan budaya, agama, dan perlindungan sosial.

Adapun yang termasuk ke dalam belanja negara antara lain:<sup>29</sup>

1) Belanja pegawai

Adalah kompensasi baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai meliputi gaji dan pensiun, tunjangan beras, uang makan dan lauk pauk, lain-lain pegawai dalam negeri dan luar negeri.

2) Belanja barang dalam negeri dan luar negeri

Adalah pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan termasuk biaya pemeliharaan serta biaya perjalanan.

3) Belanja modal

Adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka pembentukan modal, yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, belanja modal lainnya dan belanja modal non fisik.

4) Pembayaran bunga utang

Adalah pembayaran atas biaya pinjaman yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.

---

<sup>29</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm 122.



#### 5) Subsidi

Alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa.

#### 6) Belanja hibah

Adalah transfer rutin/nodal yang sifatnya tidak wajib dari pemerintah pusat kepada negara lain dan kepada organisasi internasional.

#### 7) Bantuan sosial

Adalah transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

#### 8) Transfer daerah

Adalah dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

### **3. Upah Minimum Kabupaten/Kota**

#### a. Pengertian Upah Minimum Kabupaten/Kota

Pembayaran dapat dibedakan menjadi gaji dan upah. Gaji dapat diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, dan manajer. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah seperti pekerja pertanian.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Sadono Sukirno, *Op Cit*, hlm. 350.

Beberapa ahli ekonom dan beberapa literatur lainnya seperti Edwin B. Flippo mendefinisikan upah sebagai harga untuk jasa yang telah diberikan seseorang kepada orang lain. Hadi Poernomo juga mengemukakan bahwa upah adalah jumlah keseluruhan yang dibayarkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan tenaga kerja meliputi masa atau syarat tertentu. Serta Dewan Penelitian Pengupahan Nasional yang mendefinisikan upah sebagai suatu imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu pekerjaan atas dasar suatu perjanjian kerja.<sup>31</sup>

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan oleh pemerintah dengan memerhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi/bupati/walikota dan

---

<sup>31</sup> Henderik Nugraha, "Pengertian Upah Menurut Para Ahli", <[www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)>. Diakses pada 20 Januari 2020.

setiap tahun kadangkala berubah sesuai dengan tujuan ditetapkan minimum.

Sedangkan upah minimum kabupaten/kota adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota. Penetapan upah minimum kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum provinsi. Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal berlakunya yaitu 1 Januari.

Menurut Simanjuntak, kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi yaitu upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja.<sup>32</sup>

Upah minimum kabupaten/kota merupakan komponen dari pendapatan seseorang yang tinggal di suatu daerah sehingga tingkat upah merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan kesejahteraan masyarakat dari suatu negara. Peningkatan upah minimum akan meningkatkan kebutuhan hidup layak sehingga standar hidup layak juga mengalami peningkatan. Akibat peningkatan upah minimum yang diterima, daya beli masyarakat mengalami peningkatan sehingga berdampak positif pada indeks pembangunan manusia. Upah minimum juga merupakan salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin

---

<sup>32</sup> Herman, *Op Cit.*, hlm. 25

menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang ingin mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi upah minimum Kota suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya.<sup>33</sup>

Simanjuntak mengungkapkan bahwa prinsip sistem pengupahan ada tiga yaitu:

- 1) Mampu menjamin kehidupan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya.
- 2) Mencerminkan suatu bentuk imbalan yang akan diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada perusahaan.
- 3) Pemberian intensif yang dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dari para pekerja dan pendapatan nasional.

Adapun tujuan dari ditetapkannya upah minimum adalah untuk mengurangi persaingan yang tidak sehat antar buruh dalam pasar kerja yang disebabkan oleh tidak sempurnanya pasar kerja, melindungi daya beli buruh yang berpenghasilan rendah karena tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli buruh, dan mengurangi kemiskinan karena dengan meningkatnya upah minimum masyarakat yang miskin juga akan berkurang.

#### b. Komponen Upah

Adapun yang termasuk ke dalam komponen upah antara lain adalah:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Bappeda, *Op Cit.*

<sup>34</sup> Gajimu, "Periksa Upah Minimum Indonesia", <[www.gajimu.com](http://www.gajimu.com)> Diakses pada tanggal 23 Januari 2020.

- 1) Upah pokok, merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasar perjanjian.
- 2) Tunjangan tetap, merupakan suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan.
- 3) Tunjangan tidak tetap, merupakan pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja dan diberikan secara tidak tetap bagi pekerja dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok.

Sedangkan yang tidak termasuk komponen upah adalah:

- 1) Fasilitas, yaitu kenikmatan dalam bentuk nyata karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.
- 2) Bonus, yaitu pembayaran yang diterima pekerja atas hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja berprestasi melebihi target produksi yang normal atau karena peningkatan produksi.

Tetapi jika merujuk pada pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja komponen upah minimum hanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Besarnya gaji pokok adalah 75% dari upah minimum dan tunjangan tetap sebesar 25% dari upah minimum. Berdasarkan Undang-Undang No. 13

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjadi indikator dari penetapan upah minimum itu sendiri antara lain adalah:<sup>35</sup>

1) Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhansatu bulan.

2) Indeks Harga Konsumen (IHK)

Adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga

c. Jenis-Jenis Upah

Dalam jangka panjang upah pekerja akan mempunyai kemampuan yang semakin sedikit dalam membeli barang dan jasa yang dibutuhkan akibat dari kenaikan-kenaikan harga barang dan jasa tersebut yang berlaku dari waktu ke waktu. Untuk itu, sejumlah ahli ekonomi membagi upah menjadi beberapa jenis yakni;

---

<sup>35</sup> Rahma Merdekawaty dkk, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan Menggunakan Model SAR", *Jurnal Gaussian*, Vol. 5 No.3, (2016), ISSN: 2339-2541, hlm. 526.

1) Upah uang

Adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.

2) Upah riil

Adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.<sup>36</sup>

3) Upah hidup

Dalam hal ini upah yang diterima seorang pekerja itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi.

4) Upah minimum

Suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah minimum terbagi menjadi 4 yakni: Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

5) Upah wajar

Upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para pekerjanya sebagai uang imbalan atas jasa-

---

<sup>36</sup> Sadono Sukirno, *Op Cit*, hlm. 351.

jasa yang diberikan pekerja kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka.<sup>37</sup>

#### d. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tingkat Upah

Menurut Moekijat terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam penentuan tingkat upah, yang antara lain:<sup>38</sup>

- 1) Gaji atau upah yang diberikan oleh pihak swasta
- 2) Kondisi keuangan negara dan peraturan pemerintah
- 3) Biaya hidup
- 4) Produktivitas pegawai
- 5) Persediaan tenaga kerja
- 6) Kondisi dan jam kerja
- 7) Perbedaan geografis
- 8) Inflasi dan harga pasar, serta:
- 9) Pendapatan nasional

Sedangkan menurut Mohammad Agus, faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tingkat upah adalah:<sup>39</sup>

- 1) Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Suatu pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang tinggi dan jumlah tenaga kerja yang tersedia langka akan cenderung memiliki tingkat permintaan yang tinggi yang menyebabkan tingkat upah menjadi tinggi. Sedangkan, untuk pekerjaan yang memiliki tingkat penawaran yang tinggi serta tidak membutuhkan tingkat keterampilan yang tinggi, pekerjaan seperti ini akan cenderung memiliki upah yang rendah.

---

<sup>37</sup> Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.100.

<sup>38</sup> Moekijat., *Sistem Akuntansi*, (Yogyakarta: BPFE, YKPN, 2016), hlm. 14.

<sup>39</sup> Mohammad Agus, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 142



## 2) Organisasi Buruh

Keberadaan organisasi serikat pekerja yang saat ini semakin banyak dikalangan pekerja menjadikan kedudukan pekerja semakin kuat, hal ini semakin membuat posisi tawar para pekerja semakin tinggi.

## 3) Konsistensi internal dan eksternal

Struktur gaji atau upah yang baik dapat memenuhi syarat konsistensi internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan konsistensi internal adalah sistem pengupahan didasarkan pada prinsip keadilan di lingkungan perusahaan sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan konsistensi eksternal adalah sistem pengupahan berdasarkan pada keadilan dibanding dengan keadaan perusahaan lain yang sejenis

### e. Sistem Pengupahan dalam Islam

Dalam Islam diatur sistem tentang upah pekerja dalam konsep *Ijarah*. Sebagai contoh *Ijarah* antara lain seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu bangunan, mengupah seseorang untuk menjahit baju, mengupah seseorang untuk memperbaiki sepatu dan sebagainya berupa pekerjaan-pekerjaan yang boleh mengupah seseorang untuk melakukannya. Adapaun sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya yaitu:

#### 1) Disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda: *“Barang siapa mengerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”* (HR. Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri).

Dalam hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya orang yang memberi pekerjaan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat dan motivasi bagi pekerja untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan.

2) Membayar upah sebelum keringatnya kering

Rasulullah SAW menganjurkan orang yang memberikan pekerjaan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda: *“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringat-keringat mereka.”* (HR. Ibnu Majah).

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan. Namun, dalam Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Dalam kandungan dari kedua hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.

## 4. Pertumbuhan Ekonomi

### a. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi tiga bagian yakni:<sup>40</sup>

#### 1) Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis

##### a) Friedrich List (1789-1846)

Menurut Friedrich, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi 4 tahap yaitu masa berburu dan pengembaraan, masa beternak dan bertani, masa kerajinan, industri dan perdagangan.

##### b) Karl Butcher (1847-1930)

Menurut Karl, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dibedakan menjadi 4 tahap yaitu masa rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia.

#### 2) Teori Klasik

##### a) Adam Smith

Teori Adam Smith yang tertuang dalam bukunya *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada pertumbuhan penduduk. Dengan adanya penambahan penduduk, akan terjadi penambahan output atau hasil.<sup>41</sup>

##### b) David Ricardo

David Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai dua kali lipat pada

---

<sup>40</sup> Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 39.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 41.

suatu saat akan menyebabkan melimpahnya jumlah tenaga kerja dan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami stagnan. Teori ini dituangkan David dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political and Taxation*.

### 3) Teori Neo Klasik

#### a) Robert Solow

Robert berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan output. Pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif.

#### b) Harrod Domar

Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut.<sup>42</sup>

#### b. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional. Menurut Arsyad, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional Bruto.<sup>43</sup> Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Sebab, dengan menggunakan harga konstan, pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, sehingga jika angka yang muncul adalah nilai uang dari total output, perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu.<sup>44</sup>

Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi penting bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.<sup>45</sup>

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara. Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti

---

<sup>43</sup>Wensy Rompas, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia", *Ekombies Reviewe*, 3, No. 2 (2015), hlm. 194.

<sup>44</sup> Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*, (Universitas Indonesia, 2008), hlm. 129.

<sup>45</sup> Amir Machmud, *Op Cit*, hlm. 37.

perkembangan ekonomi fisik. Beberapa perkembangan ekonomi fisik yang terjadi di suatu negara adalah pertambahan produksi barang dan jasa, dan perkembangan infrastruktur. Semua hal tersebut biasanya diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara dalam periode tertentu.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara atau daerah yang tercermin dari meningkatnya produksi barang dan jasa secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

#### c. Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi

Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai berikut:<sup>46</sup>

##### 1) Akumulasi modal

Akumulasi modal akan terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk dapat memperbesar output pada masa yang akan datang. Akumulasi modal dapat berupa pabrik-pabrik, gedung, mesin, peralatan dan barang-barang. Akumulasi modal akan meningkatkan stok modal suatu negara sehingga pada gilirannya akan memungkinkan suatu negara mencapai tingkat output yang lebih besar.

##### 2) Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berarti semakin banyak jumlah angkatan kerja semakin banyak

---

<sup>46</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), hlm. 270.

pasokan tenaga kerja dan semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik.

### 3) Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya teknologi yang canggih akan menyebabkan semakin efektif dan efisien dalam proses produksi akan barang dan jasa yang nantinya akan memicu pertumbuhan ekonomi.

#### d. Rumus Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan aktivitas perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian. Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi (*rate of economic growth*), dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$g = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

G = Pertumbuhan ekonomi (%)

$Y_t$  = PDB/PDRB tahun sekarang (Rp)

$Y_{t-1}$  = PDB/PDRB tahun sebelumnya (Rp)

Jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah tinggi maka pembangunan manusia di daerah tersebut juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembangunan daerah selain aspek pemerataan dan stabilitas. Peningkatan kegiatan pembangunan suatu daerah akan

sukar diwujudkan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

e. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspekti Islam

Beberapa ahli dalam bidang ekonomi memberikan perhatian yang cukup terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi telah ada dalam wacana pemikiran Muslim Klasik tentang “pemakmuran bumi” yang merupakan pemahaman dari firman Allah QS. Hud (11: 61) yang artinya:

*“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”*

Kalimat “pemakmuran bumi (tanah)” mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: “Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran tanah dengan perhatian yang lebih besar daripada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran tanah. Barangsiapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran tanah, negara tersebut akan hancur”. Pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam merupakan hal yang sarat akan nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak



dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut mengandung hal yang negatif misal yang mengandung efek buruk dan dapat membahayakan manusia.

## B. Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014) yang mengkaji mengenai keterkaitan antara Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/ Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau. Kesimpulan penelitian memiliki hasil bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Sebagai rujukan atau pokok penelitian dapat kita lihat dari tabel penelitian terdahulu pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama Peneliti                          | Judul Penelitian   | Persamaan dan Perbedaan Variabel  | Hasil Penelitian   |
|-----|--|--|---|--|
| 1.  | Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014) | Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap | Persamaan:<br>Upah Minimum Kabupaten/Kota, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia<br>Perbedaan:<br>Tingkat Kemiskinan | Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM di provinsi Riau.<br>Upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif |

|    |                                    |   |  |  |
|----|------------------------------------|---|--|--|
|    |                                    | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau   | dan Tingkat Pengangguran   | terhadap indeks pembangunan manusia.   |
| 2. | Herman (2018)                      | Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekanbaru   | Persamaan: Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Indeks Pembangunan Manusia.                                       | Upah minimum kota berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Pekanbaru   |
| 3. | Zainuddin (2015)                   | Analisis Dampak Inflasi, PDRB, dan Perkembangan Upah Minimum Regional terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh.   | Persamaan: Perkembangan Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia<br>Perbedaan: Inflasi dan PDRB  | Inflasi, PDRB, dan perkembangan UMR baik secara simultan atau pun parsial berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Aceh.  |
| 4. | Septiyana Arum Nurul Farida (2018) | Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel | Persamaan: Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia<br>Perbedaan: PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal | Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan belanja modal sebagai variabel intervening pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap |

|    |   |  |   |   |
|----|---|--|---|---|
|    |   | Intervening pada Provinsi di Indonesia tahun 2014 -2016  |   | indeks pembangunan manusia Provinsi di Indonesia  |
| 5. | Denni Sulistio Mariza (2012)                            | Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006 -2009               | Persamaan: Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia.<br>Perbedaan: Kemiskinan dan Belanja Modal                                      | Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.<br>Pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.   |
| 6. | Dewi Azizah dan Ady Soejoto (2017)                      | Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM Di Indonesia | Persamaan: Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia<br>Perbedaan: Distribusi Pendapatan dan Tingkat Pengangguran | Distribusi pendapatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM.<br>Tingkat pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM.                    |
| 7. | Merang Kahang, M. Saleh dan Rachmad Budi Suharto (2016) | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai               | Persamaan: Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia   | Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.<br>Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap |

|     |                          |  |   |   |
|-----|--------------------------|--|---|---|
|     |                          | Timur  |   | indeks pembangunan manusia.   |
| 8.  | Novita Dewi (2017)       | Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau   | Persamaan: Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia<br>Perbedaan: Kemiskinan                            | Kemiskinan berpengaruh dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.<br>Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.  |
| 9.  | Nur Baeti (2013)         | Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten /Kota Di Provinsi Jawa Tengah | Persamaan: Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah<br>Perbedaan: Pengangguran | Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.   |
| 10. | Sintong Ariansyah (2018) | Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Produk Domestik Bruto Di Indonesia                            | Persamaan: Pengeluaran, Indeks Pembangunan Manusia<br>Perbedaan: Produk Domestik Bruto                            | Pengeluaran pemerintah daerah fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB perkapita dan IPM. Pengeluaran pemerintah daerah fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM tetapi tidak berpengaruh terhadap PDRB perkapita. |

## C. Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengeluaran Pemerintah terhadap IPM

Pengeluaran pemerintah merupakan nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah dalam menjalankan perekonomian. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Kebijakan yang dijalankan pemerintah dengan dialokasikannya pengeluaran dapat mendorong dan meningkatkan pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sintong Ariansyah yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah fungsi ekonomi, fungsi kesehatan dan fungsi pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan demikian hubungan antara pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, dan fungsi pendidikan dengan indeks pembangunan manusia adalah positif. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> = Pengeluaran pemerintah diduga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011-2018.**

### 2. Upah minimum kabupaten/kota terhadap IPM

Melalui suatu kebijakan pengupahan, Pemerintah Indonesia berusaha untuk menetapkan upah minimum yang sesuai dengan standar kelayakan hidup yang diharapkan mampu menjamin dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang pada akhirnya akan

dapat meningkatkan pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Herman yang menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten/kota berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan demikian hubungan antara upah minimum kabupaten/kota dan indeks pembangunan manusia adalah positif. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> = Upah minimum kabupaten/kota diduga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011-2018.**

### **3. Pertumbuhan ekonomi terhadap IPM**

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.<sup>47</sup> Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Denni Sulistio Mariza yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan demikian hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia adalah positif. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Bappeda, Sumatera Selatan.

**H<sub>3</sub> =Pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011- 2018.**

**4. Pengeluaran pemerintah, upah minimum kabupaten/kota, dan pertumbuhan ekonomi terhadap IPM**

Pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sintong Ariansyah dan Nur Baeti. Serta upah minimum kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf. Dengan demikian, hubungan antara pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi, kesehatan dan pendidikan, upah minimum kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia adalah positif. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

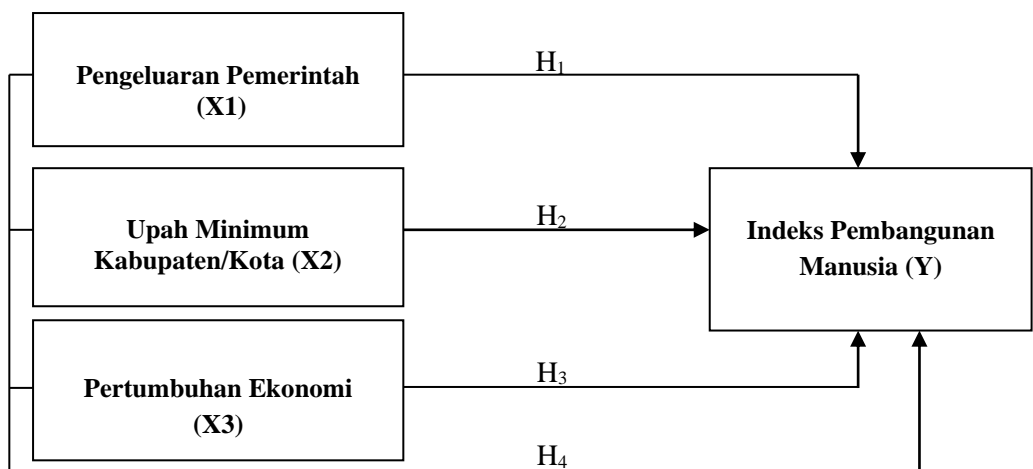
**H<sub>4</sub> =Pengeluaran pemerintah, upah minimum kabupaten/kota, dan pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011-2018.**

**D. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga disimpulkanlah bahwa beberapa faktor

yang dianggap mempengaruhi indeks pembangunan manusia yang menjadi objek dalam penelitian ini, diantaranya adalah pengeluaran pemerintah, upah minimum kabupaten/kota, dan pertumbuhan ekonomi. Skema yang menggambarkan hubungan antara pengeluaran pemerintah, upah minimum kabupaten/kota, dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Keterangan:

H<sub>1</sub>, H<sub>2</sub>, H<sub>3</sub> : Pengaruh secara parsial

H<sub>4</sub> : Pengaruh secara simultan

## E. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya sehingga berdasarkan identifikasi masalah, kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis yang telah dijelaskan, maka penelitian ini mengambil hipotesis sebagai berikut :

1. H<sub>1</sub> = Pengeluaran pemerintah diduga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap indeks pembangunan



manusia di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011  
2018.

2.  $H_2$  = Upah minimum kabupaten/kota diduga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011  
2018.
3.  $H_3$  = Pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011  
2018.
4.  $H_4$  = Pengeluaran pemerintah, upah minimum kabupaten/kota, dan pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011  
2018.